

**KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH
DI KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU
(KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

DECKI RAHMAN PUTRA
NIM. 10727000326

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugasnya Camat mempunyai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu: mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Hal ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 tahun 2004 bahwa segala tugas yang dikerjakan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana kedudukan camat Sebagai perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Apa yang menjadi pendelegasian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan oleh Camat sebagai perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk dalam golongan kan kedalam penulisan yang dilakukan secara *Field Research* dengan cara melakukan *Survey* dengan cara turun langsung kelapangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan camat didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu sebagai kepala wilayah di daerah Kecamatan, dan juga sebagai kepala Koordinator pemerintahan dan juga sebagai kepala pembangunan dan pemasyarakatan. Dengan demikian pemerintahan kecamatan adalah sebagai tolak ukur dalam hal pembangunan di Kabupaten/kota. Dan yang paling terpenting adalah bahwa camat merupakan pemimpin dalam pembentukan pemerintahan yang baik dan juga pembangunan yang merata dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya sebagai contoh adalah pembuatan jalan dengan semenisasi, perbaikan jembatan . Sedangkan pendelegasian kewenangan dari kepala daerah kepada camat dalam menjalankan pemerintahan yaitu haruslah dengan selalu berkoordinasi dengan pihak kabupaten/kota yang dalam artian bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak camat haruslah memberikan laporan kepada kepala daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I : PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Batasan Masalah.....8

C. Pokok Permasalahan8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian9

E. Metode Penelitian.....10

F. Sistematika Penulisan14

BAB II : GAMBARAN UMUM KECAMATAN TANDUN15

A. Profil singkat Kecamatan Tandun15

B. Keadaan Geografis dan keadaan Penduduk16

C. Struktur Organisasi Kecamatan Tandun18

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tandun20

BAB III : TINJAUAN UMUM32

A. Desentralisasi Dan Implementasi Otonomi Daerah32

B. Sejarah lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah43

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Kedudukan Camat Sebagai Perangkat Daerah Di Kecamatan Tandun (Kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).....	53
B. Pendelegasian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan oleh Camat sebagai perangkat daerah di Kecamatan Tandun (Kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).....	63
C. Bentuk-bentuk Pendelegasian Kewenangan Oleh Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Tandun.	67
 BAB V : PENUTUP	 73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II. 1 Jumlah Penduduk Perdesa di Kecamatan Tandun	17
II. 2 Jumlah Penduduk Perdesa Menurut Jenis Kelamin	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah mengalami proses perkembangan yang cukup panjang. Sampai saat ini sudah beberapa kali dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang yang mengatur Tentang Pemerintahan Daerah. Ada dua aspek penting perubahan secara substansial menjadi warna berbagai Undang-Undang tersebut pengaturan mengenai susunan pemerintahan daerah dan corak serta kadar *desentralisasi* dalam pelaksanaan otonomi daerah.¹

Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia telah ada sebelum Bangsa Indonesia Merdeka, bahkan semenjak Bangsa Indonesia masih dalam zaman Kerajaan Hindu dan Budha, pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit telah dikenal daerah-daerah kekuasaan kerajaan tersebut, dan wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan itu sangat luas. Namun yang akan dikemukakan dalam penelitian ini hanya dimulai semenjak zaman pendudukan (penjajahan) Bangsa Belanda di Indonesia.

Apabila ditelaah dari sejarah pembentukan UUD 1945, dapat dikatakan bahwa Moh. Yamin adalah orang pertama yang membahas masalah Pemerintah Daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang itu Moh. Yamin, mengatakan:

¹ Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 18.

“Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah.. antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan urusan dalam, Pangreh Praja”.²

Pemikiran Moh. Yamin mengenai Pemerintahan Daerah dapat dijumpai lagi dalam pidatonya tanggal 11 Juli 1945 dihadapan BPUPKI, yang antara lain mengatakan:

“Pemerintahan dalam Republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah, pemerintah ini saya namakan pemerintahan bawahan. Antara pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan itu adalah pemerintahan yang baik saya sebut pemerintahan tengahan. Perkara desa barangkali tidak perlu saya bicarakan di sini, melainkan kita harapkan saja, supaya sifatnya diperbaharui atau disesuaikan dengan keperluan zaman baru.”³

Seperti halnya Yamin, Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, juga menyampaikan suatu keterangan tentang daerah bahwa menyetujui bentuk persatuan (*unie*). Oleh karena itu, dibawah Pemerintahan Pusat/di bawah negara tidak ada negara lagi. Tidak *onderstaat*, akan tetapi hanya daerah. Bentuknya daerah itu dan bagaimana bentuk pemerintahan daerah, ditetapkan dalam Undang-Undang.⁴

Kemudian, pada 18 Agustus 1945, Soepomo, di hadapan sidang PPKI atas permintaan Soekarno (selaku ketua PPKI), memberikan penjelasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang akan disahkan sebagai Undang-Undang

² Ni'matul Huda, *Otonomi daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 1.

³ Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Penerbit Siguntang, 1971), Jilid I, h. 100

⁴ *Ibid*, h.263

Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Dalam sidang PPKI itu, Soepomo memberi penjelasan tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

“Di bawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah: tentang pemerintah daerah di sini hanya ada satu pasal, yang berbunyi: pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang⁵ hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus dipakai untuk Pemerintahan Daerah, artinya Pemerintahan Daerah harus juga bersifat permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah...”

Berdasarkan pendapat dari dua tokoh perancang UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah: *Pertama*, keberadaan daerah otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. *Kedua*, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraan dilakukan dengan “memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.” *Ketiga*, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan ”memandang dan mengingat hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki

⁵ Bagir Manan, *Penjelasan Historis Pasal 18 UUD 1945*, (Karawang: UNISKA, 1993), h.16-17.

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.⁶

Adapun pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana pada pasal 1 ayat (5) yang berbunyi yaitu sebagai berikut

“Hak, wewenang , dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang- undangan.”

Dari pengertian diatas tadi jelaslah bagi kita bahwa yang menentukan tentang kemajuan tentunya daerah yang mengeluarkan kebijakan terhadap dirinya adalah daerah itu sendirinya tanpa ada intervensi dari pusat maupun pihak lain namun tidak semuanya dilakukan otonomi daerah ada pada bidang tertentu yang tidak dilakukan pelimpahan wewenang kepada tingkat daerah sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut ”Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah”.

Mengenai urusan yang belum dilimpahkan pengurusan ke Pemerintahan Daerah yaitu dijelaskan dalam pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 adalah:

- a. Politik luar negeri.
- b. Pertahanan,

⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-3, h. 52

- c. Keamanan,
- d. Yustisi,
- e. Moneter dan fiskal nasional,
- f. Agama.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Kawasan kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan dibidang teknis pemerintahan⁷. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

⁷ Pasal 126 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.⁸

Kehadiran pertama kali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai batu penjurur penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah telah membawa serangkaian perubahan, baik pada tahap *filosofis, pola dan fungsi* utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun paradigma yang digunakan.⁹

Dengan keluasaan kewenangan yang diberikan kepada setiap daerah otonom dan diterapkan pola, maka format dan isi otonomi daerah akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Refleksi dan keluasaan kewenangan tersebut menuntut perlunya dilakukan penataan kembali lembaga pemerintahan, termasuk kelembagaan pemerintahan kecamatan. Hal ini dirasakan sangat penting karena kecamatan telah berubah statusnya dari lingkungan administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota, serta perubahan fungsi utama dari promotor pembangun menjadi fasilitator dan pelayanan masyarakat.¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ Agus Yusoff, *Desentralisasi di Indonesia*, (Riau: Suska Press, 2007), Cet. ke-2, h. 98

¹⁰ Sadu Wasisitiono, *Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan*, (Bandung: Citro Pindo, 2002), h. 7

Dalam menjalankan tugasnya Camat mempunyai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu: mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan per Undang-Undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.¹¹

Juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 Tahun 2004 bahwa segala tugas yang dikerjakan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota“ .

Kecamatan Tandun merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pembagian Kecamatan Tandun lama menjadi Kecamatan Tandun, Kecamatan Ujungbatu dan Kecamatan Kabun.

Sebagai Organisasi Daerah, Kecamatan Tandun merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Bupati dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Kecamatan Tandun dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yaitu: **“KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DI KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam melakukan pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membatasi penelitian ini tentang kedudukan Camat sebagai perangkat daerah (Kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

C. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² *Ibid*

1. Bagaimana kedudukan Camat Sebagai perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana pendelegasian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan oleh Camat sebagai perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah?
3. Bagaimana bentuk pendelegasian kewenangan oleh Bupati Rokan Hulu kepada Camat Tandun?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis harapkan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan Camat Sebagai perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui pendelegasian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan oleh Camat sebagai perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Untuk mengetahui bentuk pendelagasian kewenangan oleh Bupati Rokan Hulu kepada Camat Tandun.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian yang penulis harapkan yaitu adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hukum tata negara khususnya dalam pengkajian peranan dan kedudukan Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum dan juga untuk memberikan gambaran kepada masyarakat.
2. Untuk menambah bahan ataupun informasi data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan atau ruang lingkup yang sama.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program strata satu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.¹⁴

¹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), Cet.ke-5, h. 2

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan *survey* ke lapangan dimana tempat penelitian itu akan dilakukan penelitian tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakannya penelitian ini adalah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Pertimbangan mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian karena penulis melihat di Kecamatan ini terdapat beberapa masalah mengenai pendelegasian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan oleh camat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Camat dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kecamatan Tandun, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan camat dan pendelegasian wewenang Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan Tandun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perangkat kecamatan, kepala desa se-kecamatan Tandun (9 desa), dan masyarakat di Kecamatan Tandun. Karena populasinya terlalu banyak, maka penulis menetapkan sampel sebanyak 10 orang terdiri dari: 1 orang Camat Tandun,

1 orang Kepala Hubungan Masyarakat Kecamatan Tandun, 1 orang Sekretaris Kecamatan Tandun, 1 orang Kepala Seksi Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, 3 orang kepala desa, dan 3 Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tandun.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap subjek yang dijadikan responden serta informan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari pemerintah daerah setempat dan dari literature-literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu beberapa buku-buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan judul penelitian

ini. Dalam observasi ini dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, sebab data hasil observasi ini dipandang lebih akurat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian.

7. Teknik Analisa Data

Data yang penulis peroleh berupa dokumen, kemudian data tersebut penulis olah sesuai dengan masalah pokok penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelasan, selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan cara membandingkan dengan ketentuan hukum pendapat ahli/teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Terakhir penulis mengambil kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus dari data yang diperoleh untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum dari ketentuan perundang-undangan dan Keputusan menteri dalam negeri tentang struktur organisasi dan tata kerja kecamatan yang berlaku dan pendapat ahli.

8. Metode Penulisan

- a. Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terbagi dalam:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan umum mencakup profil singkat kecamatan Tandun, letak dan batas wilayah, struktur organisasi kecamatan Tandun serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tandun.
- BAB III : Tinjauan teoritis desentralisasi dan implementasi otonomi daerah serta sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini meliputi pembahasan Kedudukan Camat sebagai perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dan Pendelegasian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan oleh Camat sebagai perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta bentuk-bentuk pendelegasian wewenang oleh Bupati Rokan Hulu kepada Camat Tandun
- BAB V : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN TANDUN

A. Profil singkat Kecamatan Tandun

Kecamatan Tandun adalah pemekaran Kecamatan Tandun yang lama. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2003 atas perubahan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dan Perda Rokan Hulu No.16 Tahun 2003 tanggal 20 Mei Tahun 2003, yang beribu kota di Desa Tandun dan memiliki 9 (Sembilan) desa sebagai wilayah kerjanya. Luas Kecamatan Tandun $\pm 386,99 \text{ KM}^2$.

Kecamatan Tandun merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang resmi terbentuk berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembagian Kecamatan Tandun Lama menjadi Kecamatan Tandun, Kecamatan Ujungbatu dan Kecamatan Kabun. Dan Juga merupakan amanat dari peraturan daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu.

Sebagai Organisasi daerah, Kecamatan Tandun merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Bupati dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Kecamatan tandun dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh bupati yang disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan dengan

memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

B. Keadaan Geografis dan Keadaan Penduduk

Kecamatan Tandun letaknya ± 50 KM dari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu, dan ± 159 KM dari Ibu Kota Propinsi Riau. Luas wilayah Kecamatan Tandun adalah $\pm 386,99$ KM² yang berbatasan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung/ Kab. Kampar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ujungbatu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabun

Kecamatan Tandun terdiri dari 9 Desa yaitu:

1. Desa Tandun
2. Desa Tapung Jaya
3. Desa Dayo
4. Desa Bono Tapung
5. Desa Kumain
6. Desa Pulo Raya
7. Desa Sei. Kuning
8. Desa Koto Tandun
9. Desa Tandun Barat

Kepadatan penduduk di Kecamatan Tandun dengan jumlah penduduk \pm 25.868 Jiwa. Penduduk Laki-laki 13.299 Jiwa dan penduduk Perempuan 12.639 Jiwa.

Tabel II. 1

Jumlah penduduk per-desa di Kecamatan Tandun

No	Desa	Jumlah (Jiwa)
1	Tandun	7.192
2	Tapung Jaya	2.673
3	Dayo	3.332
4	Bono Tapung	1.916
5	Kumain	2.125
6	Puo Raya	2.530
7	Sei Kuning	2.046
8	Koto Tandun	2.122
9	Tandun Barat	1.932
Jumlah		25.868

Sumber : Kantor Kecamatan Tandun, 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Tandun adalah 25.868 jiwa. Dimana jumlah penduduk per-desanya adalah relatif berimbang, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 13.229 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 12.639 jiwa. Untuk lebih

jelas mengenai komposisi penduduk per-desa berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II. 2
Jumlah Penduduk per-Desa Menurut Jenis Kelamin

No	Desa	Jumlah (Jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1	Tandun	3.679	3.513
2	Tapung Jaya	1.372	1.310
3	Dayo	1.680	1.652
4	Bono tapung	1.002	914
5	Kumain	1.108	1.017
6	Puo raya	1.260	1.270
7	Sei Kuning	1.078	968
8	Koto Tandun	1.064	1.058
9	Tandun barat	986	946
Jumlah		13.229	12.639

Sumber : Kantor Kecamatan Tandun, 2011

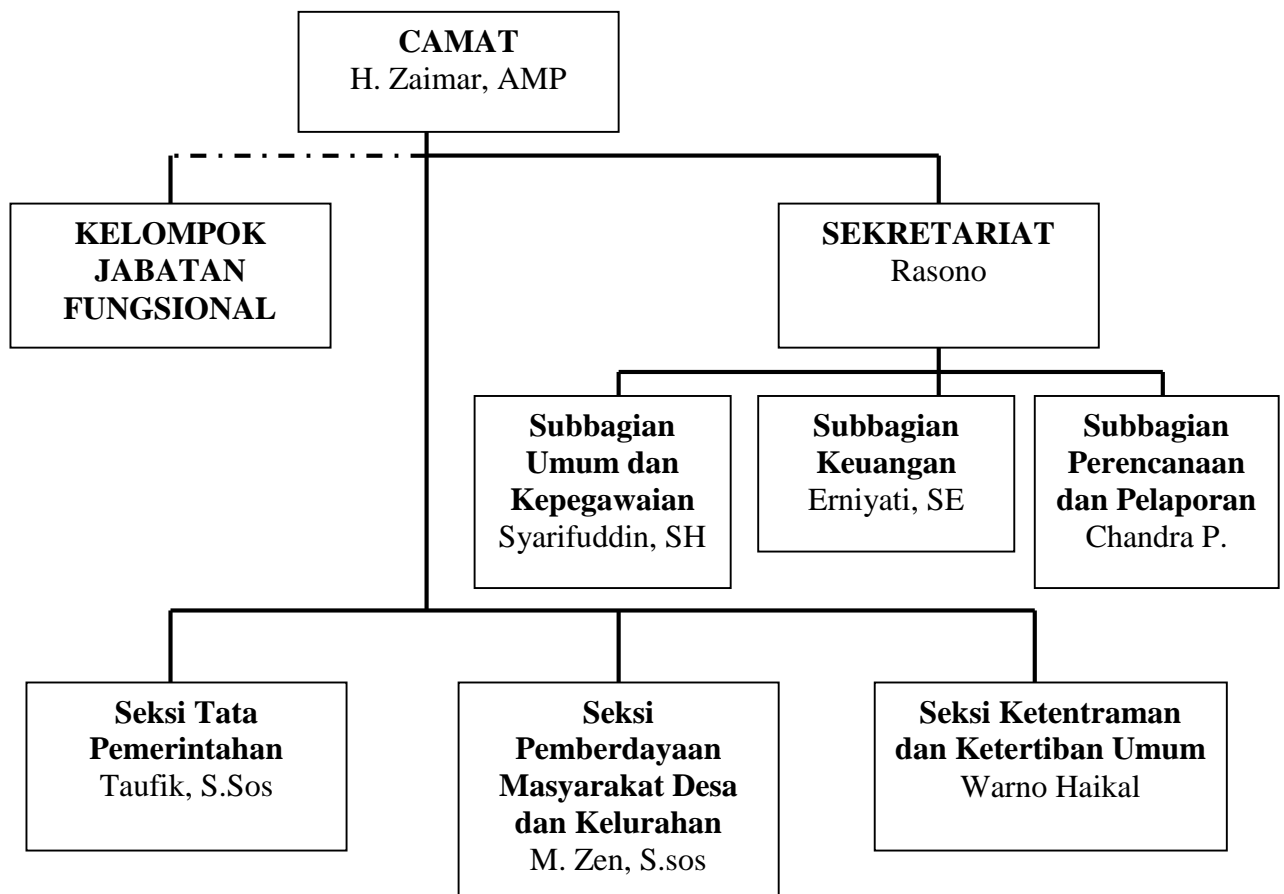
C. Struktur Organisasi Kecamatan Tandun

Pegawai kantor Camat Tandun berjumlah 27 Orang, mayoritas dari pegawainya berpendidikan SMA atau 55,55 %. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya maka diperlukan sistem dan manajemen yang baik. Faktor koordinasi sangat penting untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal agar tujuan yang

diinginkan dapat tercapai tentunya dibutuhkan suatu struktur organisasi, dimana struktur organisasi disusun secara lebih efektif dan efisien.

Struktur organisasi adalah suatu kerangka kegiatan yang merupakan pembagian kerja dan membuat tata hubungan antara pekerjaan-pekerjaan yang keseluruhannya dan menjamin koordinasi dan kesempurnaan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Struktur organisasi pada kantor Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Tandun



Sumber : Data Kecamatan Tandun (berdasarkan PERDA Kab. Rokan Hulu No. 4 Tahun 2011 tentang pembentukan susunan organisasi kecamatan dan kelurahan)

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tandun

I. CAMAT

Tugas :

1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan parasarana dan fasilitas umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa.

Fungsi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan;

2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
3. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
7. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian
10. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;

11. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
12. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
13. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
14. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang kegiatan pemerintahan;
15. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
16. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
17. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
18. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa;
19. Pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa;
20. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa;
21. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa di tingkat kecamatan;

22. Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di tingkat kecamatan kepada Bupati;
23. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
24. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
25. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
26. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
27. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
28. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

II. SEKRETARIAT

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, administrasi perencanaan dan administrasi kepegawaian ;

2. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
3. Penyelenggaraan penyusunan anggaran kecamatan;
4. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan ;
5. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
6. Pengkoordinasian dan pembagian tugas-tugas terhadap seksi-seksi sebagai perpanjangan tangan dari Camat,
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas :

Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian dilingkungan kecamatan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan kecamatan.
2. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan kecamatan.
3. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.

4. Pelaksanaan pembuatan dan penyiapan bahan pembinaan, dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan kecamatan.
5. Penyusunan, pengelolaan dan pengendalian pelayanan keprotokolan, upacara,, pertemuan, penyelenggaraan rapat-rapat dinas, dan acara lainnya.
6. Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
7. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset kecamatan lainnya.
8. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor.
9. Pelaksanaan pengadaan, penyiapan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor.
10. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas kecamatan.
11. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
12. Pelaksanaan pengumpulan pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian.
13. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai.
14. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

15. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.
16. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.
17. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai.
18. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP 3, DUK, Sumpah/janji pegawai.
19. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
20. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.
21. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

IV. SUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Tugas :

Subag Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan program kerja kecamatan.
2. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan perangkat daerah lainnya di wilayah kecamatan.

3. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan seperti Rencana Strategis Kecamatan, LAKIP, Penetapan Kinerja, Laporan Bulanan, dan lain-lain.
5. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan tugas.
7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

V. SUBAG KEUANGAN

Tugas :

Subag Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan.
2. Pelaksanaan pengumpulan bahan pembuatan anggaran kecamatan.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan kecamatan.

4. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah.
5. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan.
6. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan.
7. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan/ pemeriksaan SPJ.
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

VI. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Tugas :

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan:
2. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintah kecamatan;
3. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang

pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan;

4. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah Desa, organisasi kemasyarakatan di Desa serta bantuan Desa;
6. Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Wali Desa
7. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
8. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan pertanahan.
9. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pelaksanaan pemilihan umum
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;

VII. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tugas :

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati di wilayah kecamatan;
2. Pembinaan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan daerah dengan instansi terkait;
5. Pelaksanaan pelayanan di bidang perijinan dan pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey, riset, penelitian, kuliah kerja nyata dan lain-lain,
6. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan kerukunan antar umat beragama, suku, golongan, serta pengawasan aliran yang mengganggu kerukunan masyarakat.
7. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi pengawasan orang asing.
8. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

VIII. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN

Tugas :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan penyelenggaraan program kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan; perindustrian, perdagangan, perkoperasian, perekonomian, pertambangan dan energy
3. Pelaksanaan pembinaan untuk peningkatan usaha gotong royong,
4. Pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan Desa dan pembangunan pada umumnya
5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
6. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit lain di lingkungan kecamatan

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Desentralisasi Dan Implementasi Otonomi Daerah

Implementasi Otonomi Daerah menurut R.P Soeroso dalam tulisannya di waktu negara kesatuan Republik Indonesia baru saja terbentuk kembali ditahun 1950, berkata :

“ Yang amat penting pula dengan segera diselenggarakan ialah pemerintahan di daerah-daerah, oleh karena pemerintahan di daerah itu adalah sendi negara kesatuan. Sendi ini harus baik dan sentosa agar supaya negara kesatuan mempunyai pemerintahan yang stabil. Daerah-daerah yang sebelum negara kesatuan terbentuk, sama menunjukkan keinginannya untuk mendapat otonomi yang teratur baik, harus dengan segera diberi otonomi itu, agar supaya daerah-daerah itu dengan segera dapat merasakan bahwa daerah-daerah itu dalam ketatanegaraan tidak mengalami kemunduran”¹⁵

Struktur negara kesatuan yang berasas desentralisasi dapat dipandang sebagai tatanan politik dan sebagai tatanan administratif. Disebut tatanan politik karena struktur yang demikian merupakan wadah pengembangan demokrasi pemerintahan di daerah yang intinya ialah : penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, banyak sekali Undang-Undang yang dihasilkan dalam rangka Otonomi Daerah. Dan didalam penelitian yang Penulis lakukan ini tidak dapat Penulis rincikan satu persatu mulai dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda,

¹⁵ Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik dan PerUndang-Undangan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alumni,1983), h. 81.

Zaman Pendudukan Jepang sampai dengan Zaman Kemerdekaan. Akan tetapi, untuk mencapai sebuah hasil penelitian yang baik maka dengan ini, Penulis hanya memberikan gambaran tentang produk Undang-Undang yang telah dilahirkan dalam rangka Otonomi Daerah. Adapun Undang-Undang yang pernah ada yang mengatur tentang Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1945

Sebenarnya Undang-Undang ini hanya mengatur tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, namun dapat dikatakan pada hakikatnya mengatur tentang Pemerintahan Daerah (desentralisasi dan Otonomi Daerah)¹⁶. Mengenai keterlibatan Komite Nasional Indonesia Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah bersama dengan Kepala Daerah ini, dapat dilihat dari kedudukan atau fungsi Komite Nasional Indonesia Daerah sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri :

“.....Komite Nasional Indonesia Daerah itu hendaknya menjadi badan Legislatif, dipimpin Kepala Daerah, sedangkan sebagian dari Komite Nasional Indonesia Daerah dipimpin pula oleh Kepala Daerah, hendaknya menjalankan pemerintahan sehari-hari”.

Dari ketentuan tersebut, secara nyata memperlihatkan kelemahan yang menimbulkan persoalan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu menciptakan dualisme kekuasaan eksekutif. Yang dikemudian hari kekeliruan ini

¹⁶ Krisna D Darumurti, *Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 32

menjadi salah satu alasan dan pendorong meunculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.¹⁷

2. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1948

Memperhatikan materi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, tampak adanya upaya untuk mewujudkan makna bunyi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. hal itu terlihat dari Penetapan yang ada dalam Undang-Undang tersebut, yaitu :

1. Landasan pelaksanaan desentralisasi yang rasional sebagai sarana mempercepat kemajuan rakyat di daerah
2. Diadakannya 3 (tiga) tingkatan daerah otonom, yaitu Provinsi bagi Daerah Tingkat I, Kabupaten dan Kota Besar bagi Daerah Tingkat II dan Desa (Kota kecil, Desa, marga dan sebagainya) bagi daerah Tingkat III
3. Menghilangkan dualisme pemerintahan di daerah
4. Pembentukan daerah istimewa di daerah-daerah yang mempunyai hak-hak usulan di zaman sebelum Republik Indonesia telah mempunyai pemerintahan sendiri.

3. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1957

Dengan penetapan Undang-Undang ini, menurut Prof. Mr. Amrah Muslimin, menyatakan : “kita bertambah mendekati uniformitas, mengenai peraturan dasar tentang Pemerintahan di daerah, karena dengan mulai dilaksanakannya UU No. 1/1957, UU yang lama yaitu: UU RI No 22/1948, UU NIT no. 44/1950, UU no. 1/1956 (tentang Kotapraja Jakarta Raya),

¹⁷ *Ibid*, h. 33

S.G.O., S.G.O.B. dan lain-lain berhenti berlaku, kecuali beberapa ketentuan yang masih berjalan dalam masa peralihan¹⁸.

Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ini bermaksud untuk mengatur sebaik-baiknya soal-soal yang semata-mata terletak dalam lapangan otonomi dan medebewind di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan maksud pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara yang berarti juga akan merubah prinsip cara-cara pemerintahan bentuk lama¹⁹.

4. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 18 Tahun 1965

Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pula perubahan itu terutama dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1957 dan kebutuhan penyesuaian susunan pemerintahan daerah dengan susunan menurut Undang-Undang Dasar 1945²⁰.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, intinya menetapkan bahwa dekonsentrasi dan desentralisasi berjalan dengan menjunjung tinggi desentralisasi teritorial, dan dualisme pemerintahan di daerah di hapuskan.

Melalui Undang-Undang ini, maka wilayah Indonesia dibagi atas daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom) dan tersusun dalam 3 tingkatan yakni :

¹⁸ Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik Dan PerUndang-Undangan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 87.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Krisna D Darumurti, *Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

1. Provinsi dan/atau Kota Raya sebagai Daerah Tingkat I
2. Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II
3. Kecamatan dan/atau Kota Praja sebagai Daerah Tingkat III

Patut dicatat, bahwa semasa berlakunya Undang-Undang ini, Pembentukan Daerah Tingkat III tidak pernah terlaksana, walaupun sempat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja²¹.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (Desentralisasi dan Otonomi Daerah Yang Berlaku Pada Masa Orde Baru 1966-1998)

Undang-Undang ini disebut "Undang-Undang tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah", oleh karena dalam Undang-Undang ini diatur tentang Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah yang berarti bahwa dalam Undang-Undang ini diatur pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekosentrasi dan asas tugas pembantuan di daerah.

Undang-Undang ini merupakan koreksi dan penyesuaian baru dari UU Nomor 18 Tahun 1965 sesuai dengan pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 lahir sesudah adanya pengarahan politik mengenai Pemerintah Daerah dalam GBHN. Undang-Undang ini lahir sebagai pelaksanaan Tap MPR No.IV Tahun 1973 dan juga di bawah rangka UUD 1945. UU Nomor 5 Tahun 1974 mulai berlaku tanggal 23 Juli 1974 hingga 6 Mei 1999.

²¹ *Ibid*

UU Nomor 5 Tahun 1974 dinilai sangat bernuansa sentralistis dan kurang memperhatikan kedudukan DPRD sebagai badan legislatif yang berdiri sendiri²².

Adapun latar belakang situasi dan nuansa pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut²³ :

1. Sedang giatnya sosialisasi pembangunan ekonomi dan menomorduakan pembangunan politik. Pemerintah Orde baru dengan trilogi pembangunan pada waktu itu hendak menciptakan stabilitas nasional yang mantap.
2. Untuk itu diperlukan pemerintah yang stabil dari Pusat sampai ke Daerah.
3. Selanjutnya dibuatlah berbagai Undang-Undang yang sentralistis, mengurangi kegiatan Partai Politik dan memandulkan peran DPR dan juga peran DPRD. Bahkan di Daerah kedudukan Kepala Daerah sengaja dibentuk dengan istilah *penguasa tunggal* dan menomorduakan peran DPRD.
4. Memaksakan fusi Partai-partai dari sembilan Partai menjadi 2 partai di samping dominasi Golkar.
5. Pengukuhan dan pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI di segala bidang dan sektor pemerintahan termasuk di bidang legislatif dari Pusat sampai ke Daerah.

²² B.N Marbun, *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 52.

²³ *Ibid*

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui prinsip stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Tujuan itu mengandung arti bahwa pemberian otonomi kepada suatu daerah perlu didukung oleh faktor-faktor yang bersifat teknis administratif, yang secara minimal dapat menjamin kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Hal di atas dapat dipahami karena Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan Pemerintah Daerah, di dalamnya terkandung aspirasi politik yang pada hakikatnya ingin menempatkan Pemerintah Daerah sebagai bagian penting dari Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspirasi politik sebagaimana yang dimaksudkan itu, kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana asas desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, serta memberi kemungkinan bagi tugas pembantuan (*medebewind atau co-administration*)²⁴.

Sebagaimana telah diketahui, berbeda dengan kedua Undang-Undang Pemerintahan di Daerah yang terdahulu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak menyebut secara eksplisit sistem otonomi yang dianutnya. Kedua

²⁴ Krisna D Darumurti, *Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 40.

Undang-Undang terdahulu dimaksud menyatakan diri menganut sistem otonomi riil.

Mengenai hal ini, Koesoemahatmadja²⁵ menganggap ada persamaan antara sistem otonomi yang dianut oleh Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1974 dengan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yang pada dasarnya merupakan sistem otonomi formil, akan tetapi dinamakan oleh Pemerintah sistem otonomi riil.

Namun, Sujamto²⁶ meragukan pandangan Koesoemahatmadja tersebut di atas dengan mengatakan: "... Sepanjang mengenai Undang-Undang Nornor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 barangkali anggapan tersebut mengandung kebenaran (meskipun tidak seluruhnya)".

Sehubungan dengan prinsip otonomi tersebut di atas, terdapat beberapa Otonomi Daerah. Hal itu dapat dilihat pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: "pembentukan, nama, batas, ibuKota, hak dan wewenang urusan serta modal pangkal daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang".
- b. Pasal 5, yaitu mengenai kemungkinan penghapusan sesuatu daerah.

²⁵ Koesoemahatmadja, R.D.H, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), h. 63

²⁶ Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984), h. 33

- c. Pasal 7 yang berbunyi : "Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku".
- d. Pasal 8 ayat (10) yang berbunyi : "Penambahan penyerahan urusan Pemerintah kepada Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".
- e. Pasal 9 yang berbunyi : "Sesuatu urusan Pemerintah yang telah diserahkan kepada Daerah dapat ditarik kembali dengan peraturan perUndang-Undangan yang setingkat" (maksudnya ialah setingkat dengan penyerahannya).
- f. Pasal 10 yang mengharuskan dibentuknya Dewan Perimbangan Otonomi Daerah yang bertugas untuk "memonitor" perkembangan dan dinamika Otonomi Daerah sebagai bahan pertimbangan kepada Presiden, kiranya jelas merupakan perlengkapan yang tidak diperlukan seandainya Undang-Undang ini menganut sistem rumah tangga formil, meskipun tidak pula dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini menganut sistem rumah tangga materiil.
- g. Pasal 39 yang mengatur pembatasan-pembatasan terhadap ruang lingkup materi yang dapat diatur oleh Peraturan Daerah, apabila dibandingkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, maka jelas bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 lebih dekat kepada sistem otonomi materiil daripada kedua Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menganut sistem *otonomi materiil*. Pendapat itu diperkuat oleh praktek pembentukan Dinas Daerah, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang mana dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan Dinas Dati I dan Dinas Dati II. yang dibentuk berdasarkan terjadinya penyerahan sebagian urusan Pusat kepada Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah"²⁷

Ketentuan diatas merupakan pelaksanaan yang konsekuen kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dalam Penjelasan Umumnya, antara lain menyatakan bahwa Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Dinas-Dinas Daerah adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah. Pembentukan Dinas Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan belum diserahkan kepada Daerah dengan suatu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah menjadi urusan rumah tangganya, tidak dibenarkan.

Dalam perkembangannya, setelah Undang-Undang ini berjalan selama 18 (delapan belas) tahun, pemerintah mulai mempertimbangkan pendapat para ahli sebagaimana telah dikemukakan di muka, yang pada intinya menegaskan bahwa Daerah Tingkat II sudah seharusnya merupakan daerah otonom sepenuhnya. Namun demikian, pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana

²⁷ *Ibid*

dimaksud tadi, belumlah diterapkan secara serentak dan menyeluruh. Pemerintah masih memandang perlu dilakukan uji coba terdahulu, sebelum benar-benar daerah diberikan otonomi sepenuhnya.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Desentralisasi dan Otonomi Daerah Yang Berlaku Pada Masa Reformasi 1999-2004)

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁸.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara²⁹.

²⁸ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 36.

²⁹ *Ibid*, h. 37.

Lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah merupakan koreksi total atas kelemahan yang terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Bersamaan dengan itu disusul dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 dilengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah³⁰.

Adapun latar belakang situasi dan nuansa pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut³¹ :

1. Suasana reformasi mendapat tafsir yang kurang tepat.
2. DPRD dan Pemerintah Daerah "mabuk" reformasi dan membuat Perda yang tumpang tindih dengan peraturan perUndang-Undangan lainnya.
3. Maraknya korupsi di DPRD seluruh Indonesia.
4. DPRD bertindak "*overacting*" berhadapan dengan Kepala Daerah terutama menyangkut Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap akhir tahun dan pada masa akhir jabatan Kepala Daerah
5. Amandemen UUD 1945 oleh MPR.

B. Sejarah lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan UU No. 22 Tahun 1999 terjadi disamping karena ada Perubahan UUD 1945, juga memerhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR, seperti: Ketetapan MPR RI. No. IV/MPR/2000 tentang

³⁰B.N Marbun, *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 56.

³¹*Ibid*

Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan MPR RI tahun 2002 dan Keputusan MPR RI No. 5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran Atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan MPR RI tahun 2003.

Ada pandangan yang mengatakan bahwa prinsip Pemerintah Daerah yang dimuat dalam UUD 1945 setelah perubahan merupakan prinsip yang dipaksakan agar terjadi sinkronisasi antara UUD 1945 dengan UU No. 22 Tahun 1999. Pandangan lain mengatakan bahwa penegasan dalam Pasal 18 UUD 1945 setelah perubahan merupakan koreksi terhadap prinsip-prinsip yang sudah terlanjur diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999. Sebab, perubahan UUD 1945 Pasal 18 terjadi pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 lahir pada tahun 1999, mendahului perubahan UUD 1945.

Koreksi itu, misalnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten Kota yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Penjelasan Pasal 4 menyatakan, yang dimaksud dengan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain adalah bahwa Daerah Provinsi tidak membawahi kabupaten Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota. Penegasan demikian itu dipandang bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seolah-olah antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota tidak lagi ada

hubungan sama sekali. Maka, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 memberikan koreksi dengan menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Hal lain yang perlu disempurnakan dari UU No. 22 Tahun 1999 akibat perubahan Pasal 18 UUD 1945, yakni: *Pertama*, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). Dengan demikian, tidak ada unsur dekonsentrasi. Prinsip ini lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk Pemerintahan Daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 maupun UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan berbagai asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yaitu asas desentralisasi, asas tugas pembantuan, dan asas dekonsentrasi. Perbedaan asas-asas tersebut. Untuk menghindari kreasi-kreasi yang menyimpang dari makna dan tujuan Pemerintah Daerah. Pasal 18 menegaskan Pemerintahan Daerah hanya dijalankan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.³²

Kedua, berkaitan dengan sistem pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945). Prinsip pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara demokratis ini merupakan prinsip yang sengaja disesuaikan atau prinsip untuk tidak memangkas habis sistem pemilihan Kepala

³² Bagir Manan, *Penjelasan Historis Pasal 18 UUD 1945*, (Karawang: UNISKA, 1993), h.8-9.

Daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999, bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Namun pada Sidang Tahunan MPR 2001, muncul prinsip pemilihan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945). Dengan penegasan tersebut seharusnya ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 maupun UU No. 22 Tahun 1999 perlu disempurnakan kembali dengan mengikuti ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.

Ketiga, dengan ada perubahan struktur kelembagaan MPR melalui perubahan UUD 1945 pada tahun 2002 (Pasal 2 ayat (1)), keanggotaan MPR tidak lagi diisi oleh Utusan Golongan dan Utusan Daerah, tetapi berubah keanggotaannya menjadi terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilu. Konsekuensi dari perubahan susunan keanggotaan MPR tersebut adalah kehilangan kewenangan DPRD (Provinsi) untuk memilih utusan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) butir b jo Pasal 26 huruf c UU No. 22 Tahun 1999. Di samping itu, kehadiran lembaga DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945 yang mempunyai tugas dan wewenang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada pengaturan bagaimana hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan DPD dapat saling mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan bidang politik di tahun 2003, otomatis perubahan itu akan berpengaruh secara langsung

ataupun tidak langsung terhadap UU No. 22 Tahun 1999, yakni UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, (UU Pemilu) dan DPRD; UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk); UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga undang-undang yang terkait di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Oleh karena proses rekrutment maupun susunan dan kedudukan DPRD dalam UU No. 22 Tahun 1999 masih mengacu kepada UU Pemilu dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD tahun 1999, maka berbagai ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1999 perlu disesuaikan dengan UU Pemilu dan UU Susduk yang baru.

Sebagai contoh disini dapat dikemukakan di sini; *Pertama*, ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 19 menyebutkan DPRD berhak meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tetapi, menurut UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 62 dan 78, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah termasuk tugas dan wewenang DPRD. Hal seperti ini akan membingungkan. *Kedua*, pemberian “hak subpoena” kepada DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 22 Tahun 1999 bagi mereka yang menolak dan tidak memenuhi permintaan DPRD, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Sementara itu, dalam Pasal 66 ayat (3) dan (4)

Susduk 2003 ditentukan dengan ancaman panggilan paksa dan diancam disandera paling lama lima belas hari.

Ketiga, terkait dengan keberadaan lembaga baru Dewan Perwakilan Daerah. Dalam UU Susduk 2003 telah diatur mengenai lembaga DPD, di mana tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPD berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu, UU No. 22 tahun 1999 perlu menyesuaikan dengan UU Susduk untuk mengatur hubungan antara DPD dengan Pemerintah Daerah, agar aspirasi daerah dapat disalurkan melalui DPD.

Keempat, dengan adanya perubahan dalam sistem pemilihan secara langsung, baik untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden maupun untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka sistem pemilihan Kepala Daerah yang masih dipilih oleh DPRD dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip demokrasi dan dinamika masyarakat. Untuk itu, mekanisme pemilihan Kepala daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999 perlu disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Demikian gambaran perubahan UUD 1945 dan perundang-undangan di bidang politik. Salah satu akibat langsung perubahan ini adalah keharusan meninjau kembali UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Berbagai ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan paradigma atau pandangan baru mengenai pemerintahan daerah.

Perbedaan yang terdapat antara UU No 22 tahun 1999 dengan UU No 32 Tahun 2004 yakni dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Dimana

dalam UU No 22 Tahun 1999 proses pemilihan kepala Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*Indirect election*) sementara dalam ketentuan UU No 32 Tahun 2004 proses pemilihan kepala daerah dilakukan oleh rakyat secara langsung (*direct election*).

Menurut Rozali Abdullah³³ ada beberapa alasan mengapa harus di laksanakan Pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala daerah secara langsung, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembalikan Kedaulatan Ketangan rakyat

Warga masyarakat di daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Republik Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang dijamin dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harus di beri kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

2. Legitimasi yang sama antara Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD.

Seperti di ketahui, dalam pemilu legislatif 5 april 2004 yang lalu , anggota DPRD di pilih langsung oleh rakyat pemilih melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dipilih

³³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.20.

oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi anggota DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Kedudukan yang Seajar antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD

Pasal 16 ayat (2) UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD, sebagai badan legislatif daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 ayat (1) UU No 22 Tahun 1999, kepala daerah di pilih oleh DPRD dan menurut Pasal 31 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (3) UU No 22 Tahun 1999, kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Logikanya adalah apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, berarti kedudukan DPRD berada diatas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu untuk memberikan kedudukan sebagai mitra sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat.

4. Mencegah Terjadinya Politik Uang (*Money politics*)

Pada era berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, sering kita dengar isu-isu mengenai terjadinya politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini sudah merupakan rahasia umum, dan hampir terjadi di semua daerah. Masalah politik uang ini di mungkinkan terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah. Dengan di laksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, kemungkinan terjadinya politik uang ini bisa di cegah, atau setidaknya-tidaknya bisa dikurangi. Apabila masih ada pihak-pihak yang ingin melakukannya, mereka akan berhadapan langsung dengan pemilih yang jumlahnya cukup banyak.

Ada empat hak yang melekat pada pengertian Otonomi Daerah yakni:

- a. Hak untuk memilih pemimpinnya sendiri secara bebas.
- b. Hak untuk memiliki dan mengelola kekayaan sendiri secara bebas.
- c. Hak untuk membuat Peraturan Daerahnya sendiri secara bebas.
- d. Hak kepegawaian (hak mengangkat, menempatkan, memindahkan, menggaji, memberhentikan pegawainya sendiri) di serahkan kembali kepada daerah Otonom³⁴.

Dengan diundangkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ini, maka UU No. 22 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan yang paling signifikan yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 yakni mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. UU No 32 Tahun 2004 ini terdiri dari 240 pasal. Dari 240 pasal tersebut, 63 pasal di antaranya mengatur tentang pemilihan kepala kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, yaitu Pasal 56 sampai dengan Pasal 119.

³⁴ Sadu wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokus Media. 2002), h. 30.

Dalam rangka mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat, sesuai tuntutan reformasi dan amandemen UUD 1945, UU ini menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dengan cara memilih calon secara berpasangan. Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Asas yang digunakan dalam pemilihan kapala daerah dan wakil kepala daerah sama dengan asas pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003, yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Camat Sebagai Perangkat Daerah Di Kecamatan Tandun Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Kedudukan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini memang sangatlah menentukan sekali untuk kelancaran pada tingkat kecamatan ini dikarenakan banyak program ataupun pekerjaan yang didelegasikan oleh Bupati kepada pihak kecamatan.

Gerakan reformasi tidak hanya memasang target rezim orde baru yang akan dihilangkan tetapi juga bertujuan membangun Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, setelah rezim Soeharto tumbang, pemilu segera dilaksanakan dan pemilu tidak saja dilaksanakan untuk mewujudkan aspirasi dan kedaulatan rakyat dalam memajukan pimpinannya, tetapi juga bagian dari peralihan kekuasaan yang dilakukan secara demokratis. Dengan bergejolaknya permintaan untuk merubah sistem pemerintahan yang dari otoriter menjadi lebih demokratis dan transparan antara pemerintahan dengan rakyat, baik yang ada pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

Kehadiran pertama kali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai batu penjurus penyelenggaraan Desentralisasi dan otonomi daerah telah membawa serangkaian perubahan, baik pada tahap *filosofis, pola dan fungsi* utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun paradigma yang digunakan.

Dengan keluasan kewenangan yang diberikan kepada setiap daerah otonom dan diterapkan pola, maka format dan isi otonomi daerah akan berbeda

antara satu dengan yang lainnya. Refleksi dan keluasaan kewenangan tersebut menuntut perlunya dilakukan penataan kembali lembaga pemerintahan, termasuk kelembagaan pemerintahan kecamatan. Hal ini dirasakan sangat penting karena kecamatan telah berubah statusnya dari lingkungan administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota, serta perubahan fungsi utama dari promotor pembangun menjadi fasilitator dan pelayanan masyarakat.³⁵

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Camat Tandun terhadap kedudukan Camat didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Camat merupakan sebagai kepala wilayah³⁶ dan ini juga termaktub didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai kepala wilayah didalam wilayah kecamatan, dan juga sebagai koordinator dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Yang dalam artian bahwa camat ini merupakan kepala wilayah dan juga dapat sebagai koordinator pemerintahan kecamatan sebagai contoh dalam hal pertanahan dan pendataan penduduk. Kemudian dalam hal pembangunan dan kemasyarakatan ini sebagai contoh adalah pembangunan jalan dan juga pembangunan sumber daya manusia dan penambahan skill untuk penambahan pendapatan seperti dengan diadakan pelatihan menjahit³⁷, dan ditambah juga dari hasil wawancara penulis dengan

³⁵ Sadu wasisitiono, *Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan*, (Bandung: Citro Pindo, 2002), h. 7

³⁶ H. Zaimar, A.MP (Camat Tandun), *Wawancara*, Tanggal 04 Oktober 2011

³⁷ M. Zen (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Tandun), *Wawancara*, Tanggal 06 Oktober 2011

masyarakat menyatakan bahwa benar pihak Kecamatan Tandun sering mengadakan pelatihan menjahit dan juga pelatihan pertukangan³⁸.

Mengacu kepada kedudukan Kecamatan sebagai suatu perangkat daerah yang menjalankan pemerintahan di tingkat Kecamatan ada beberapa yang dirumuskan dalam loka karya yang di adakan oleh Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yaitu sebagai berikut :

1. Dari aspek kelembagaan, organisasi Kecamatan sebaiknya ditetapkan sebaiknya ditetapkan sebagai unsur ini wilayah dalam artian Kecamatan dijadikan pusat pelayanan pada masyarakat yang bersifat operasional dengan batas wilayah sebagi batas pemberian pelayanan.
2. Kepada camat didelegasikan sebagian kewenangan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, khususnya yang menyangkut berbagai urusan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta pelindung masyarakat.
3. Pendelegasian kewenangan tidak harus diberikan secara seragam melainkan melalui karekteristik penduduk
4. Seiring dengan beraneka ragam kewenangan yang didelegasikan, maka bentuk organisasi kecamatan tidak perlu seragam melainkan sejalan dengan luasnya kewenangan yang didelegasikan
5. Konsekuensi logis dari pendelegasian sebagai kewenangan yang berbeda-beda, maka kepada camat diberikan anggaran biaya (*Budget*) sumber daya secara proporsional sesuai dengan kewenangan camat yang bersangkutan.

³⁸ Dodi Saputra, 32 Tahun (Warga Desa Tandun Barat), *Wawancara*, Tanggal 07 Oktober 2011

6. Agar pemberian anggaran dan logistik dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pengukuran kinerja kecamatan.

Organisasi pemerintahan selain memiliki misi menyelenggarakan pelayanan publik, juga memiliki misi lainnya berupa perlindungan terhadap kepentingan masyarakat melalui pengaturan persaingan maupun pengaturan terhadap perlindungan masyarakat³⁹.

Pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi pemerintah merupakan prinsip utama yang harus dipenuhi untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas. Terpenuhiya akuntabilitas organisasi pemerintah merefleksikan kapasitas organisasi yang mampu mempersentasikan kepentingan masyarakat. Melalui akuntabilitas diharapkan kebijakan, program dan kegiatan organisasi pemerintah itu konsisten dengan kehendak masyarakat.

Pemerintahan pusat maupun daerah yang dibentuk adalah sebagai perangkat yang dibuat untuk dan berfungsi sebagai pelayan bagi kepentingan masyarakat dalam berurusan yang berkenaan dengan pemerintahan tersebut. Pemerintah daerah melayani kepentingan rakyat daerah bukan sebaliknya, rakyat yang melayani pemerintah dalam artian sekelompok orang berkuasa mengendalikan seluruh sumber-sumber kekuasaan rakyat dan menjalankan distribusi kekuasaan tersebut dengan kebijakan–kebijakan pemerintahan bagi pemenuhan kepentingan politik kelompoknya, melalui program-program pemerintahan yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan elastis dan praktek tertentu. Seharusnya kebijakan pemerintahan yang mengikuti perkembangan

³⁹ Sarundajang, *Babak baru Sistem Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Kata Hasta Pustaka, 2005), h.26

masyarakat bukannya rakyat daerah dan birokrasi yang harus masuk kepada sistem implementasikan kebijakan politik dan berbagai kepentingan politik elastis⁴⁰.

Perangkat daerah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2)⁴¹ menyatakan “organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah”.

Masuknya kecamatan dalam salah satu perangkat daerah yang menjadi penyelenggara pemerintahan sebagai perpanjangan tangan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kabupaten atau kota setempat.

Kecamatan adalah wilayah kerja dari camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dengan kedudukan kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi dan camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Perubahan kedudukan kecamatan tersebut mengakibatkan timbulnya keragu-raguan pada camat maupun perangkat daerah di kecamatan dalam menjalankan tugasnya terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jika mencermati kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah, maka jelas terkandung maksud dari pemerintah untuk memposisikan kecamatan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terkontaminasi oleh unsur-unsur politik praktis yang berkembang di masyarakat.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Kepmendagri No 158 Tahun 2004

Penegasan kedudukan camat selaku perangkat daerah ini sudah ditunjukkan dan diatur lebih tegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/kota yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
3. Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari Bupati/ Walikota.
4. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pedoman mengenai organisasi Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Sedangkan didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Kedudukan Kecamatan dalam perangkat daerah diatur lebih khususnya lebih jelas yaitu sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1&2) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat

2. Camat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota.

Camat sebagai kepala dalam wilayah kecamatan yang mempunyai tugas serta fungsinya sebagaimana dalam pasal 3 yang dinyatakan yaitu camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota sesuai dengan karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan pemerintah sebagaimana yaitu sebagai berikut, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarkatan, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya, fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, pengkoordinasian kegiatan UPTD/instansi pemerintah di wilayah kerjanya, fasilitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Desa, memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban kepala desa, fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa, fasilitasi penataan desa/kelurahan, fasilitasi penyusunan peraturan desa, pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan, pelaksanaan inventarisasi aset daerah, penegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan

perundangan lainnya yang berada dalam wilayah kerjanya. Tetapi tidak semuanya ini menjadi kinerja dari seorang Camat dan bisa dilimpahkan kepada Kelurahan.⁴²

Kemudian dalam hal penyelenggaraan pemerintah yang paling terpenting adalah sifat transparansi untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu :

- (1) Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan
- (2) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut:

- a. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

⁴² *Ibid*

- b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya
- c. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah
- d. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan
- e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Camat perlu mendapatkan sokongan dan dorongan dari Bupati yang memberikan pelimpahan kewenangan kepada Camat dan juga peran masyarakat dalam membantu untuk menyukseskan kegiatan ataupun program yang dibuat oleh Kecamatan tersebut agar lebih baik dan mempunyai hasil yang optimal⁴³. Tentunya dengan hasil yang optimal tentunya akan membuat suatu pemerintahan yang lebih baik, dan ada 10 (sepuluh) prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :

- a. Partisipasi yaitu memberdayakan setiap warga untuk mempergunakan hak dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴³ M. Taufik (Kepala Desa Tandun), *Wawancara*, Tanggal 10 Oktober 2011

- b. Penegakkan hukum, yaitu mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.
- c. Transparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Kesetaraan yaitu memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- e. Daya Tanggap yaitu meningkatkan kepekaan kepedulian para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali
- f. Wawasan kedepan yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
- g. Akuntabilitas yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- h. Pengawasan yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatann swasta dan masyarakat luas.
- i. Efisiensi dan Efektivitas yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

- j. Profesional yaitu meningkatkan kemampuan dan akhlak penyelenggara pemerintahan, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah cepat, tepat dan biaya terjangkau.

Dengan adanya konsep tentang suatu karakteristik dikatakan pemerintahan itu sudah baik dalam pelayanan yang dibebankan kepada pemerintah tersebut tentu harus mempunyai tolak ukur ataupun penilaian terhadap suatu pemerintahan, bagi setiap organisasi, pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Dengan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja dapat ditentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani menuntun perbaikan dalam pelayanan publik. Efektivitas pengukuran kinerja hanya dapat menjadi kenyataan, jika dapat dirumuskan dan ditetapkan indikator kinerja yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian misi, visi tujuan dan sasaran organisasi⁴⁴.

B. Pendelegasian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan oleh Camat sebagai Perangkat Daerah di Kecamatan Tandun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam menjalankan tugasnya Camat mempunyai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang pemerintahan daerah tentang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

⁴⁴ Rasono (Sekretaris Camat Tandun), *Wawancara*, 04 Oktober 2011

- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas pelayanan umum,
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan,
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau dan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 05 Oktober 2011 dengan Kabag Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, apakah peranan Camat dalam menjalankan pemerintahan umum telah sesuai dengan peraturan per Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah? adapun jawaban beliau terhadap pertanyaan tersebut yaitu bahwasanya Camat dalam menjalankan pemerintahan umum tentunya berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan baik dalam per Undang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, maupun Peraturan Daerah dalam artian tidaklah hanya berpatokan kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 saja tetapi peraturan yang lain yang mengatur tentang Kecamatan juga dipedomani sebagai contoh Kepmen Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 dan juga Peraturan Daerah No 24 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu⁴⁶.

⁴⁵ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 126

⁴⁶ Drs. M. Abrar (Kabag Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 05 Oktober 2011

Selanjutnya penulis menanyakan tentang siapa yang dapat menentukan peranan dan kedudukan Camat dalam menjalankan pemerintahan umum telah berhasil menurut beliau yang menentukan peranan dan kedudukan Camat dalam menjalankan pemerintahan umum adalah masyarakat karena yang langsung menikmati dari pelayanan yang diberikan oleh pihak kecamatan adalah masyarakat tersebut⁴⁷, sedangkan jawaban dari Sekretaris Camat menambahkan lagi yaitu penilaian keberhasilan Camat dalam menjalankan pemerintahan umum adalah yang pertama Bupati, karena Camat merupakan perpanjangan tangan dari tangan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan sedangkan yang kedua adalah masyarakat dikarenakan Camat merupakan secara langsung melaksanakan pelayanan publik (umum)⁴⁸.

Penulis selanjutnya menanyakan kepada Camat Tandun pada tanggal 04 Oktober 2011, apakah melaksanakan pemerintahan umum telah berjalan secara keseluruhan yang telah diamanatkan dalam UU No 32 Tahun 2004? Beliau menjawab tidaklah sepenuhnya dalam artian tidak semua yang terdapat dalam pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu dapat dijalankan atau dilaksanakannya dan juga bisa dalam hal yang lain dapat didelegasikan kepada pemerintahan desa, kelurahan atau instansi yang lainnya yang berada dibawah kewenangannya untuk menjalankannya sebagai contoh mengkoordinasikan supaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal ini kan bisa didelegasikan kepada pihak Linmas atau Hansip Masyarakat yang menikmati dari

⁴⁷ Drs. M. Abrar (Kabag Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 05 Oktober 2011

⁴⁸ Rasono (Sekretaris Camat Tandun), *Wawancara*, Tanggal 04 Oktober 2011

penyelenggaraan pemerintahan umum sebagai pelayanan yang diberikan Kecamatan, penulis menanyakan kepada tokoh masyarakat yang berada dalam wilayah Kecamatan Tandun apakah pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan sudah cukup bagus atau sebaliknya, beliau menjawab bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak Kecamatan terhadap pelayanan publik tersebut sudah cukup bagus dan tidak bertele-tele lagi sebagai perumpamaan apabila dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat tidak memerlukan masa yang lama, dan juga pelayanan yang diberikan oleh petugas juga cukup baik dalam melayani masyarakat yang berurusan pada kantor Kecamatan tersebut.

Kedudukan Camat dalam menjalankan pemerintahan ini sebagaimana yang amanatkan dalam peraturan per Undang-Undang tersebut sebagai perpanjangan tangan dari Bupati sebagai kepala pemerintahan yang berkuasa dan mempunyai wewenang terhadap sebuah Kabupaten yang dipimpin olehnya. Dalam hal pelimpahan kewenangan ini mempunyai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan secara optimal;
2. Terwujudnya pelayanan umum yang lebih baik, murah dan cepat;
3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat;
4. Terwujudnya keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan ketertiban serta keamanan masyarakat.⁴⁹

Dengan memperhatikan kewenangan daerah Kabupaten dan daerah Kota tersebut diatas, serta memperhatikan maksud dan tujuan pelimpahan kewenangan

⁴⁹ H. Zaimar, A.MP (Camat Tandun), *Wawancara*, Tanggal 04 Oktober 2011

camat lebih di fokuskan kepada pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi, pengawasan dan fungsi kewilayahan dengan memperhatikan aspirasi dan potensi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.

C. Bentuk-bentuk Pendelegasian Kewenangan Oleh Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Tandun

Dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya⁵⁰.

Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, Camat sebagai Kepala Wilayah memiliki kewenangan atributif dan juga kewenangan delegatif. Kewenangan atributif Camat sebagai Kepala Wilayah diatur dalam pasal 80 dan 81 UU Nomor 5 Tahun 1974. Sedangkan kewenangan delegatif dijalankan Camat berasal dari Kepala Wilayah yang lebih tinggi kedudukannya (Gubernur, Bupati/Walikotamadya, Walikota)⁵¹.

Berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1974, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, Camat tidak memiliki kewenangan atributif, melainkan hanya memiliki kewenangan delegatif. Hal ini secara jelas dapat dibaca dari bunyi pasal 66 ayat

⁵⁰ Sadu Wasistiono, *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*, (Bandung: Citra Pindo, 2002),h. 28.

⁵¹ *Ibid*

(4) yang mengatakan bahwa: “tanpa adanya pelimpahan kewenangan perintah dari bupati/walikota, camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah”.

Pendegelasan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dapat menggunakan dua pola yaitu:

Pola I : Seragam untuk semua Kecamatan

Pola II: Seragam untuk kewenangan tertentu yang bersifat umum ditambah dengan kewenangan spesifik yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan penduduknya⁵².

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kabag Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu terhadap pola yang terdapat diatas, maka pola mana yang akan yang bagus dipakai, berdasarkan yakni “ keanekaragaman dan kesatuan” serta dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, disarankan didalam pendegelasan sebagai kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat digunakan pola II. Pola II ini akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terutama apabila pemerintah daerah memang memiliki keinginan politisi untuk menempatkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan. Untuk kepentingan tersebut, perlu dipilah dan dipilih jenis-jenis pemberian pelayanan yang akan didelegasi kepada Camat⁵³.

Sedangkan hasil wawancara dengan Camat Tandun mengatakan bahwa pola yang dipakai adalah pola kedua dikarenakan banyak masyarakat yang beranekaragam maka diperlukan untuk mengatur dengan pola yang disesuaikan dengan karakteristik Kecamatan dan wilayahnya. Sebagaimana yang terdapat di

⁵² *Opcit*

⁵³ Drs. M. Abrar (Kabag Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 05 Oktober 2011

Tandun ini banyak dihuni wilayah oleh masyarakat yang islami dan jawa maka pihak Kecamatan akan memberikan pelayanan dan melakukan penyesuaian terhadap penduduk setempat⁵⁴.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sadu Wasistiono terhadap langkah yang harus dijalankan dalam pendelegasian yang masyarakatnya beraneka ragam maka harus menyusun langkah-langkah strategi lanjutan sebagai berikut:

1. menyusun organisasi Kecamatan;
2. menyusun perkiraan kebutuhan personil dilihat dari jumlah dan kualitasnya;
3. memperkirakan kebutuhan anggaran untuk setiap Kecamatan;
4. memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung minimal;
5. apabila ditemukan dapat dilakukan penataan ulang bebas wilayah Kecamatan dengan menggunakan pendekatan pelayanan, sebagai pengganti pendekatan wilayah administrasi pemerintahan seperti yang selama ini digunakan⁵⁵

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu⁵⁶ dengan pertanyaan apa saja kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat? beliau menjawab meliputi kewenangan umum, kewenangan khusus sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kewenangan lain yang dianggap perlu oleh Bupati/Walikota yaitu:

⁵⁴ H. Zaimar, A.MP (Camat Tandun), *Wawancara*, Tanggal 04 Oktober 2011

⁵⁵ Sadu Wasistiono, *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*, (Bandung: Citra Pindo, 2002),h. 29

⁵⁶ Drs. M. Abrar (Kabag Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 05 Oktober 2011

Kewenangan umum:

1. Bidang pemerintahan
2. Kewenangan kependudukan
 - a. Penandatanganan KTP
 - b. Surat keterangan kelahiran
 - c. Kartu keluarga
 - d. Legalisasi surat keterangan kependudukan
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - a. Penggalangan kekuatan masyarakat untuk bela Negara
 - b. Pembinaan satpl PP dan linmas di kecamatan (disatukan)
4. Penyelenggaraan pemerintahan umum
 - a. Koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas daerah di kecamatan
 - b. Pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap pemerintah desa
5. Pembangunan
 - a. Koordinasi, perenanaan pembangunan ditingkat kecamatan
 - b. Pengawasan pembangunan terhadap desa
6. Kemasyarakatan
7. Pemungutan pajak retribusi daerah

membantu mengkoordinasikan pungutan pajak dan retribusi daerah yang dipungut di wilayah kecamatan (jenis tidak dirinci karena berbeda-beda)
8. Bidang perizinan
 - a. IMB untuk rumah tinggal
 - b. Pemutihan IMB

- c. SITU untuk usaha kecil
 - d. HO / Undang-Undang gangguan nonpolutif untuk usaha kecil
 - e. Legalisasi SKT (Masih Tentatif)
 - f. Kartu keterangan mencari kerja
9. Bidang lain-lain

Penjelasan yang diberikan oleh pihak Kabag Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu ini setelah dilakukan konfirmasi dengan Camat mengatakan pendelegasian yang diberikan oleh Kabupaten kepada Kecamatan ini memang sekarang ini adalah merupakan kewenangan dari Kecamatan, sebagai perumpamaan terhadap dibidang kependudukan dalam wilayah Kecamatan Tandun ini pembuatan KTP dan pembuatan KK, Akta Kelahiran dan melegalisir KTP, KK dan Akta Kelahiran merupakan kewenangan dari Camat. Dengan demikian berarti Camat adalah merupakan lembaga yang terdekat dan pemantau terhadap masyarakatnya ketimbang dengan pihak Kabupaten⁵⁷.

Sedangkan dibidang pemerintahan adalah memakai sistem koordinasi dengan pihak vertical yang dalam artian adalah pihak pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, sebagai contoh adalah pembinaan dibidang pembangunan serta dalam hal bidang pengamanan maka diperlukan koordinasi dengan pihak Kabupaten seperti membentuk Pembela Negara dan juga pembinaan SATPOL PP atau Linmas untuk keamanan kecamatan yang berarti merupakan keamanan dari kabupaten juga⁵⁸.

⁵⁷ H. Zaimar, A.MP (Camat Tandun), *Wawancara*, Tanggal 04 Oktober 2011

⁵⁸ H. Zaimar, A.MP (Camat Tandun), *Wawancara*, Tanggal 04 Oktober 2011

Namun selain pendelegasian dibidang umum tersebut pihak kecamatan juga mempunyai kewenangan khusus yang diberikan oleh pihak Kabupaten yaitu seperti kebersihan, pembinaan PKL dan Pemberian nomor rumah. Dari kewenangan khusus ini memang tidaklah dijalankan secara keseluruhan oleh pihak Kecamatan karena ini akan berpulang kepada kondisi lapangan ataupun wilayah dari Kecamatan tersebut sebagai wilayah di Kecamatan Tandun kebersihan ataupun pemungutan kebersihan sampah tidak dapat diterapkan karena wilayah ini masih pedesaan dan masih banyak tempat untuk buang sampah, sedangkan pembinaan PKL ini tidak terdapat dalam wilayah Tandun namun ini merupakan wilayah Kecamatan Ujungbatu dan Kabun. Dan dalam hal pemberian nomor rumah ini belum dijalankan oleh pemerintahan Kecamatan Tandun, sebagaimana hasil survey penulis ini memang terbukti bahwa pihak Kecamatan belum ada memberikan nomor secara resmi kepada setiap rumah yang berada dalam wilayah Kecamatan Tandun.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV yang terdahulunya maka penulis memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan Camat didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai kepala wilayah di daerah Kecamatan, dan juga sebagai kepala Koordinator pemerintahan dan juga sebagai kepala pembangunan dan pemasyarakatan. Dengan demikian pemerintahan kecamatan adalah sebagai tolak ukur dalam hal pembangunan di Kabupaten/Kota. Dan yang paling terpenting adalah bahwa Camat merupakan pemimpin dalam pembentukan pemerintahan yang baik dan juga pembangunan yang merata dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya.
2. Sedangkan pendelegasian kewenangan dari kepala daerah kepada Camat dalam menjalankan pemerintahan yaitu haruslah dengan selalu berkoordinasi dengan pihak Kabupaten/Kota yang dalam artian bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak Camat haruslah memberikan laporan kepada kepala daerah.
3. Kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintahan Kabupaten kepada pihak Kecamatan adalah berupa kewenangan umum dan juga kewenangan khusus yang dari kewenangan umum tidak lah semuanya diberikan secara

keseluruhan dan harus mendapatkan juga pantauan dan Kabupaten, sedangkan kewenangan khusus ini tidak semua kecamatan dapat menjalankannya dikarenakan dilihat dari segi wilayahnya dan kondisi alamnya serta penduduknya.

B. Saran

Adapun yang dapat penulis sarankan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam menjalankan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan yang paling terpenting adalah bagaimana membentuk pemerintahan yang bersih dan juga selalau membuat program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal penambahan keahlian dan keamanan masyarakat.
2. Hendaknya masyarakat dapat berpro-aktif dalam setiap kegiatan yang dibuat oleh pihak pemerintahan kecamatan, dikarenakan pemerintahan kecamatan adalah pemerintahan yang menjalankan tugas pembantuan dari pihak pemerintahan Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yusoff, *Desentralisasi di Indonesia*, Riau: Suska Press, 2007
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- Bagir Manan, *Penjelasan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Karawang: UNISKA., 1993
- B.N Marbun, *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan
- Koesoemahatmadja, R.D.H, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979
- Krisna D Darumurti, *Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Moh. Kusnardi & Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (cetakan ketujuh)*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Penerbit Siguntang, 1971

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Sadu Wasisitiono, *Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan*, Bandung: Citro Pindo, 2002

----- *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media, 2002

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik dan PerUndang-Undangan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alumni, 1983

Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah